

KELOMPOK KAJIAN
PERLINDUNGAN
SOSIAL DAN TENAGA
KERJA

Muhammad Hanri
hanri@lpem-feui.org

Nia Kurnia Sholihah
nia.kurnia@lpem-feui.org

Faizal Rahmanto Moeis
faizalmoeis@lpem-
feui.org

DAFTAR ISI

Employment Working Group
dalam Presidensi G20
Indonesia – 1

Kesetaraan Gender dalam
Perspektif Ketenagakerjaan
dan Perlindungan Sosial – 4

RINGKASAN

Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 diwarnai dengan berbagai isu menarik untuk didiskusikan di antara negara-negara maju dan berkembang yang menjadi punggawa perekonomian dunia. Salah satu isu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah isu inklusivitas di bidang ketenagakerjaan, tidak hanya inklusif terhadap kelompok disabilitas tetapi juga memperhatikan kesetaraan gender. Dengan berbagai capaian yang diraih Indonesia melalui berbagai kebijakan yang berusaha mengurangi ketimpangan gender, Indonesia dapat menjadi salah satu contoh baik yang menunjukkan progres dalam pencapaian kesetaraan gender yang lebih baik, yang tentunya tetap perlu dorongan dari sisi kebijakan untuk mengakselerasi capaian tersebut agar lebih optimal.

Employment Working Group dalam Presidensi G20 Indonesia

Pada tahun 2022, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah untuk Presidensi G20, sebuah forum strategis yang menghubungkan negara maju dengan negara berkembang utama yang bertujuan untuk bersama-sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi global. Dalam forum ini, negara-negara anggota G20 mendiskusikan berbagai tantangan dan peluang serta *best practice* di negara masing-masing terkait isu tertentu. Salah satu pembahasan yang sejak tahun 2014 telah menjadi prioritas pembahasan adalah aspek ekonomi dan sosial ketenagakerjaan yang diwadahi dalam *Employment Working Group (EWG)*. Isu yang dibahas dalam *working group* ini antara lain adalah seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, maupun penciptaan iklim kerja yang baik.

Secara umum, kegiatan-kegiatan presidensi G20 sudah dimulai pada akhir 2021 dan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan baik di tingkat kementerian maupun *working group* pada awal 2022. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai *focal point* EWG juga telah menyelenggarakan dan merancang berbagai kegiatan terkait ini. Dimulai dengan *Kick-off* EWG pada 9 Desember 2021 yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia menyampaikan bahwa tahun ini EWG mengangkat tema pemulihan aspek ketenagakerjaan di masa pandemi dengan tajuk *Improving the Employment Condition to Recover Together*. Berfokus pada inklusivitas dalam ketenagakerjaan, kegiatan pertama EWG di tahun ini dimulai dengan G20 *Disabilities Inclusive Engagement* pada 26 Januari 2022. Kemudian, EWG juga mengadakan *call for paper*, konferensi, *roundtable discussion* serta pameran dan

visitasi¹. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring serta diadakan di lokasi-lokasi penyelenggaraan G20 seperti Bali dan Yogyakarta.

Dalam kelompok kerja ketenagakerjaan ini, Indonesia secara khusus menekankan pentingnya pasar tenaga kerja inklusif bagi penyandang disabilitas, seperti tantangan mengenai peningkatan keterampilan pekerja disabilitas, perluasan akses pasar tenaga kerja, serta perlindungan di tempat kerja. Diskusi mengenai isu ketenagakerjaan pada kelompok marjinal ini diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja, serta mendorong produktivitas bagi kelompok tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini juga diharapkan akan mampu meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi.

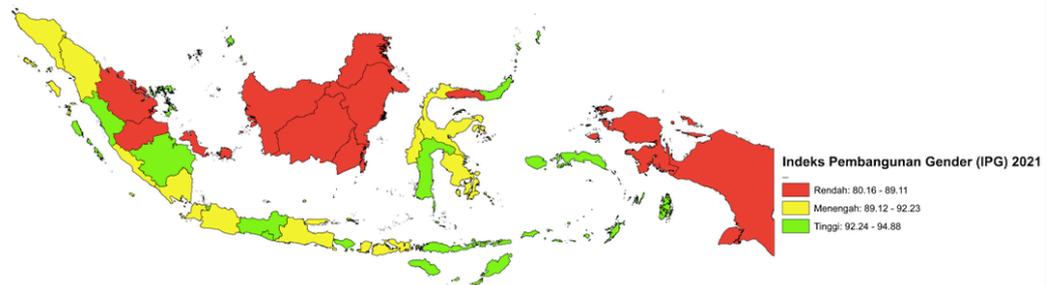
Di sisi lain, inklusivitas di bidang ketenagakerjaan tidak terbatas pada isu mengenai disabilitas saja, tetapi juga penting untuk memperhatikan dari sisi gender. Hal ini mengingat bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi sorotan di beberapa kesempatan. Dari angka *Gender Inequality Index*² tahun 2019, Indonesia menempati peringkat 121 dari 162 negara dan menjadi negara dengan peringkat paling rendah di antara negara-negara anggota ASEAN dengan skor 0,48 poin (di atas rata-rata dunia sebesar 0,436 poin). Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dengan peringkat 1 (skor 0,065 poin) dan Malaysia dengan peringkat 2 (skor 0,253 poin), Indonesia perlu memandang hal ini merupakan pertanda bahwa pencapaian pembangunan gender masih belum optimal, meskipun memiliki progres yang baik.

Distribusi kesetaraan gender di Indonesia juga beragam di level daerah. Dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG)³ sebagai indikator untuk melihat bagaimana kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan termasuk di level daerah, IPG daerah di luar Jawa masih menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah di Jawa. Di level provinsi, terlihat juga bahwa masih banyak provinsi dengan IPG di bawah rata-rata nasional (91,27) pada tahun 2021. Provinsi-provinsi dengan IPG terendah pada periode tersebut antara lain adalah Papua (80,16), Papua Barat (83), dan Kalimantan Timur (85,95). Sedangkan provinsi dengan IPG tertinggi pada periode yang sama adalah DI Yogyakarta (94,88), Sulawesi Utara (94,61) dan Sulawesi Barat (94,34).

¹ <https://g20sideevents.id/>

² Gender gap diukur melalui 4 indikator: (1) partisipasi dan peluang ekonomi, (2) pencapaian pendidikan, (3) kesehatan dan kelangsungan hidup, dan (4) pemberdayaan politik.

³ Menghitung angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan perkiraan pendapatan



Gambar 1. Indeks Pembangunan Gender 2021

Sumber: BPS 2021, diolah

Inklusivitas pembangunan ekonomi termasuk dari sisi gender merupakan salah satu isu yang penting untuk diperhatikan dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*). Melalui pilar 5 SDGs, kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan pemerintah Indonesia didorong untuk berkomitmen dalam penyediaan kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik yang sama antara perempuan dan laki-laki. Perhatian terhadap kesetaraan gender merupakan bagian dari strategi pembangunan untuk memberdayakan masyarakat secara lebih menyeluruh sehingga masyarakat dapat berdaya untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

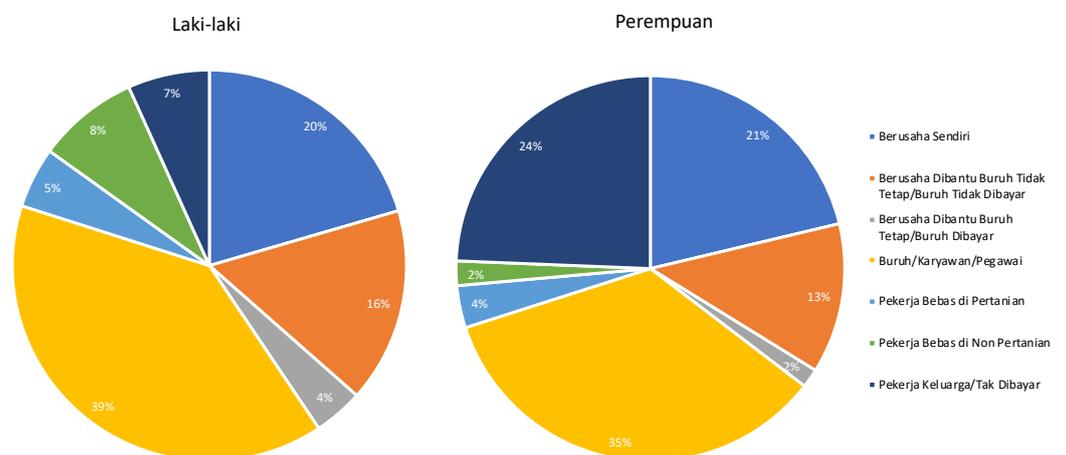
Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menaruh perhatian besar pada kesetaraan gender dalam perumusan kebijakan dan program pembangunannya. Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Presiden memberikan arahan untuk peningkatan pemberdayaan wanita melalui kewirausahaan untuk perempuan. Berbagai fasilitas juga disediakan oleh pemerintah untuk mendukung hal ini seperti kredit untuk UMKM melalui program Mekaar yang khusus menyasar pada kelompok perempuan. Selain itu, Pemerintah juga menggalakkan pengarusutamaan gender dalam perumusan dan implementasi kebijakan, program, maupun kegiatan dari pemerintah baik di level pusat maupun daerah. Di bidang pendidikan, Program Keluarga Harapan memberikan kesempatan agar anak perempuan juga mendapat kesempatan untuk mengakses pendidikan sama dengan anak laki-laki. Di bidang kesehatan, baik melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun berbagai program lainnya, pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan perempuan, serta mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan bayi.

Isu mengenai pemberdayaan wanita secara khusus juga menjadi perhatian forum G20. Melalui *The G20 Alliance for the Empowerment and Progression of Women's Economic Representation* (G20 EMPOWER) yang diluncurkan sejak 2019, forum ini mendorong advokasi dan kemajuan perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor swasta dan publik. Pada presidensi tahun ini, Kementerian PPPA bersama dengan XL Axiata dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) sebagai *focal*

point dari aliansi ini mengusung tiga isu penting (1) peningkatan akuntabilitas perusahaan dalam pencapaian *key performance indicator* (KPI) untuk meningkatkan peran perempuan; (2) peningkatan peran UMKM milik perempuan sebagai penggerak ekonomi; serta (3) pembangunan dan peningkatan ketahanan dan keterampilan digital perempuan. Pemberdayaan perempuan baik di sektor publik maupun swasta ini diharapkan mampu mendorong kesetaraan gender.

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Ketenagakerjaan

Kondisi kesetaraan gender di Indonesia salah satunya dapat dilihat dari bagaimana distribusi beberapa indikator ketenagakerjaan berdasarkan perbandingannya antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan SAKERNAS dalam 5 tahun terakhir, proporsi pekerja perempuan yang dengan jenis pekerjaan informal cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Pada tahun 2021, dari sebanyak 51,78 juta pekerja perempuan, 63,8% merupakan pekerja informal. Sedangkan pada periode yang sama, dari sebanyak 79,26 juta pekerja laki-laki, 56,61% merupakan pekerja formal. Selain itu, jika dilihat berdasarkan detail jenis pekerjaannya, setelah buruh/karyawan/pegawai, pekerja laki-laki paling banyak merupakan pekerja yang berusaha sendiri (20%) sedangkan pekerja perempuan paling banyak berikutnya merupakan pekerja keluarga/ tidak dibayar (24%). Proporsi ini sedikit banyak tidak mengalami perubahan pada 5 tahun terakhir.

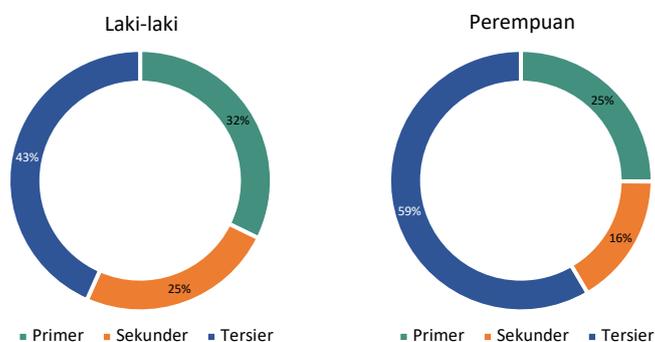


Gambar 2. Pekerja Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Sumber: SAKERNAS Agustus 2021, BPS, diolah

Sementara itu jika dilihat dari sektor pekerjaannya, secara relatif, proporsi pekerja laki-laki di sektor primer dan sekunder lebih besar dibandingkan dengan pekerja perempuan. Proporsi pekerja perempuan (59%) di sektor tersier lebih besar jika dibandingkan dengan pekerja laki-laki (43%). Hal ini sehubungan cukup tingginya proporsi pekerja perempuan di sektor perdagangan (25%) dibandingkan dengan

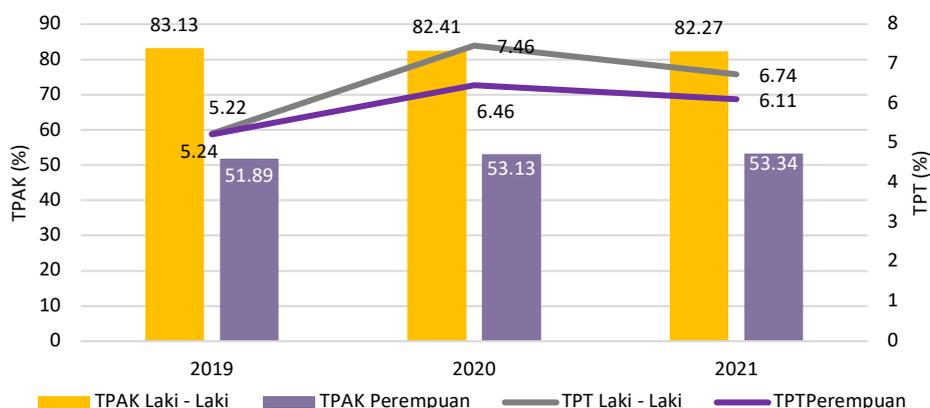
pekerja laki-laki (16%). Sementara itu, sektor dengan pekerja laki-laki paling banyak adalah sektor pertanian (30%).



Gambar 3. Pekerja Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Sektor Pekerjaan

Sumber: SAKERNAS Agustus 2021, BPS, diolah

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan (6,11%) justru tercatat lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (6,74%) pada tahun 2021. Pola ini juga ditunjukkan pada data lima tahun terakhir. Hal ini disinyalir karena tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan yang juga lebih rendah jika dibandingkan dengan TPAK laki-laki pada periode yang sama. Lebih lanjut lagi jika dilihat di level provinsi, proporsi TPAK laki-laki dibandingkan perempuan di seluruh provinsi di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK perempuan. Sedangkan untuk TPT, 50% provinsi di Indonesia memiliki TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, sebagai contoh adalah Provinsi Jambi, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 4. TPAK dan TPT Laki-laki dan Perempuan

Sumber: SAKERNAS Agustus 2021 (BPS) dan CEIC, diolah

Meskipun demikian, data tahun 2021 menunjukkan bahwa dari sisi manajerial, lebih banyak proporsi pekerja yang merupakan *white collar worker* (17,74%)

dibandingkan dari pekerja laki-laki (11,60%). Hal ini sehubungan dengan pekerja perempuan (10%) yang bekerja sebagai tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis lebih besar dibandingkan dengan laki-laki (5%). Secara umum di hampir semua provinsi juga menunjukkan bahwa *female white collar worker* lebih besar proporsinya dibandingkan dengan laki-laki.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), terlihat bahwa baik penduduk laki-laki dan perempuan yang masing-masing sebanyak sekitar 130 juta, lebih banyak yang merupakan lulusan SMA meskipun proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan pada tahun 2021. Penduduk yang menamatkan pelatihan juga tercatat lebih banyak dari kelompok laki-laki (9,78%) dibandingkan dengan kelompok perempuan (8,81%) pada periode yang sama. Di sisi lain, secara persentase, penduduk perempuan bekerja dengan kontrak kerja tercatat lebih banyak (69,65%) dibandingkan dengan pekerja laki-laki yang bekerja dengan kontrak kerja (64,33%) pada tahun 2021.

Terkait dengan dampak COVID-19, secara umum, pekerja laki-laki lebih banyak yang terdampak COVID-19. Dari pekerja yang sebelum pekerjaan saat ini sudah pernah memiliki pekerjaan, laki-laki yang berhenti kerja dari pekerjaan sebelum yang saat ini karena alasan terkait dengan COVID-19⁴ tercatat sebanyak 6,98%, lebih tinggi dari perempuan (3,95%). Namun, pekerja perempuan yang memiliki pekerjaan yang sama di Februari 2020 tercatat sedikit lebih banyak (17,33%) yang mengalami pengurangan jam kerja dibandingkan dengan pekerja laki-laki (16,98%). Di sisi lain, pekerja laki-laki yang memiliki pekerjaan yang sama di Februari 2020 dan tidak berstatus pekerja yang dibantu dan pekerja keluarga lebih banyak yang mengalami pengurangan pendapatan (39,49%) dibandingkan dengan pekerja perempuan (35,04%). Oleh karena itu, terlihat bahwa perempuan dalam menghadapi pandemi secara relatif lebih resilien dibandingkan dengan pekerja laki-laki.

Dari sisi perlindungan secara umum, proporsi pegawai/ buruh perempuan juga relatif lebih banyak yang dilindungi oleh jaminan sosial. Dari pegawai/ buruh perempuan sebanyak 17 juta orang di tahun 2021, sebanyak 42% terlindungi jaminan kesehatan, 33% terlindungi JKK, 25% terlindungi JKM, 22% terlindungi JHT, 19% terlindungi JP dan 6% terlindungi JKP. Sedangkan pegawai/ buruh laki-laki sebanyak 31 juta orang secara persentase tercatat sedikit lebih rendah yang terlindungi oleh jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan (36%), JKK (31%), JKM (22%), JHT (22%), JP (18%), dan JKP (6%).

⁴ Akibat Covid-19 meliputi 3 alasan: 1) Takut terinfeksi Corona/COVID-19; 2) Social/physical distancing, karantina mandiri, pembatasan sosial berskala besar (PSBB); 3) Alasan tersebut terkait dengan pandemi Corona/COVID-19

Capaian dan upaya Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan gender terutama di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan sosial sejauh ini sudah cukup baik. Hal ini perlu untuk didorong dengan meningkatkan peran serta perempuan dalam pasar tenaga kerja. Pada era digital, peran perempuan untuk aktif di dunia kerja dengan tetap dapat melakukan pekerjaan rumah tangga menjadi hal yang memiliki peluang besar untuk dioptimalkan karena perempuan juga dapat bekerja dari rumah. Dengan peran aktif perempuan, diharapkan hal ini akan mendorong perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, G20 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengakselerasi kesetaraan gender di Indonesia.

Referensi:

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/ketimpangan-gender-indonesia-tertinggi-di-asean-singapura-terendah>
- <https://indonesia.go.id/g20/kategori/kabar-terkini-g20/4416/g20-empower-tingkatkan-keterwakilan-perempuan-di-level-pengambil-keputusan?lang=1>
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/13/12391921/menteri-pppa-indonesia-peringkat-101-dari-156-dalam-hal-gender-gap?page=all>
- <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/>
- <https://www.bps.go.id/indicator/40/463/1/indeks-pembangunan-gender-igp-.html>
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pentingnya-kesetaraan-gender-untuk-sebuah-negara/>

